

Penyelesaian 75 Unit Rumah di Desa Rampa Kotabaru, Ketua DPRD Akan Masukkan di Anggaran Perubahan



Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/ketua-dprd-kotabaru-syairi-mukhlis-03.jpg>

Kementerian PUPR mengancam memberikan sanksi terhadap Kabupaten Kotabaru tidak mendapat gelontoran Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi tahun 2022. Ancaman itu berlaku apabila daerah melalui Disperkimtan tidak menyelesaikan 75 unit rumah sisa kegiatan DAK Integrasi tahun 2021 ini. 75 unit rumah merupakan program peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Desa Rampa, Kecamatan Pulaulaut Utara oleh Disperkimtan (Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan) akan dibiayai APBD Kabupaten.

Menyikapi hal itu [Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis](#) mengatakan, bakal ada sanksi memaksa daerah memasukkan anggaran Rp 1,6 miliar dari APBD perubahan untuk 75 unit rumah tersebut. Oleh karena itu, menurut Syairi pihaknya berhitung dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Kotabaru kondisi keuangan daerah setelah refocusing. "Karena ini ada sanksi, jika tidak menyelesaikan 75 unit rumah dibiayai APBD dengan angka Rp 1,6 miliar tadi," katanya.

Sanksi tidak dapat DAK Integrasi di tahun 2022, lanjut Syairi, mengancam gagalnya rencana pembangunan rumah eks kebakaran di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulaulaut Utara.

Syairi menegaskan, akan berusaha bagaimana pun caranya agar pembangunan rumah eks di Kelurahan Kotabaru Tengah tetap terealisasi. "Kemarin sudah disampaikan juga dengan TAPD menghitung kembali APBD, untuk memenuhi 75 unit. Selain melihat kemampuan keuangan daerah. Tapi berusahalah untuk mampu," sambung Syairi. "Dan, Pusat juga mainnya main todong

juga nih. Apabila kita tidak bisa memenuhi, ancamannya akan dibatalkan (perumahan di eks kebakaran)," lanjut Syairi.

Pemerintah Pusat, lanjutnya, seharusnya mengerti dengan kondisi daerah, sebab daerah juga harus menangani masalah Covid-19. APBD termasuk PAD dalam kondisi sekarang ini turun. "Harusnya mereka (Pusat) ini menjadikan suatu bahan pertimbangan," terangnya. Misalnya, daerah hanya mampu menganggarkan 50 persen dari yang ditargetkan (75 unit). Jangan jadi alasan mereka (Pusat) membatalkan program tahun 2022. "Daerah tentu akan mengupayakanlah," kata Syairi kepada banjarmasinpost.co.id, Senin (9/8/2021).

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III Gewsima Mega Putra, tidak menepis sanksi dari Pemerintah Pusat bila daerah tidak menyelesaikan 75 unit program Disperkimtan di Desa Rampa yang diwajibkan dibiayai APBD. Menurut Putra, pihaknya di Komisi III sudah sepakat menganggarkan penyelesaian 75 unit rumah biaya APBD. "Komisi III sudah sepakat waktu rapat Komisi dengan Perkim dan Bappeda. Kalau disetujui di KUA PPAS perubahan nanti munculnya," ujarnya.

Karena telah dibuat telaahan staf dan disampaikan ke pimpinan eksekutif. "Bappeda siap mencarikan anggarannya. Kalau Bupati saya rasa setuju. Sebab hanya Rp 1,6 miliar untuk mendapatkan Rp 30 miliar. Mengapa tidak," pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Kotabaru H Said Akhmad, mengakui penyelesaian 75 unit rumah program peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dibiayai APBD kabupaten. Menurut Said Akhmad, penyelesaian 75 unit dengan estimasi biaya Rp 1,6 miliar akan ditentukan di rapat KUA PPAS perubahan. "Ya, dibebankan ke APBD (75 unit). Nanti dilihat di rapat KUA PPAS perubahan," jelas Said Akhmad.

Pada sumber yang berbeda disampaikan, Realisasi dana alokasi khusus (DAK) fisik di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang bersumber dari APBN tahun ini cukup rendah. Dari Januari hingga Mei 2021 baru terserap enam persen.

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah dalam Rapat Perkembangan Realisasi APBN Triwulan I Tahun Anggaran 2021 di Ruang Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel. Dia mengungkapkan, pagu DAK fisik untuk Kalsel tahun ini sebesar Rp1.446.485.313.000. Namun baru terserap Rp86.584.323.432. Jadi realisasinya baru enam persen.

Rendahnya realisasi DAK fisik menurutnya, lantaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlambat dalam melaksanakan lelang pengadaan barang. Serta, ada tahapan lelang yang masih dalam proses sanggah. Selain itu, karena spesifikasi barang yang dibutuhkan tidak ada dalam e-catalog, dan data DAK fisik yang direkam oleh OPD pada aplikasi OMSPAN masih ada yang direview oleh APIP.

Selain itu menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, agar DAK cepat terserap maka proses pelaksanaan lelang pengadaan barang bisa dilaksanakan pada akhir tahun sebelumnya, setelah pagu definitif ditetapkan, serta berkoordinasi dengan LKPP untuk pemenuhan barang yang belum ada di e-catalog, dan review oleh APIP terhadap data DAK fisik agar menjadi prioritas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengingatkan pejabat satuan kerja (Satker) di jajarannya untuk tidak ragu, apalagi takut dalam mengelola kegiatan bantuan bersumber dari APBN.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/09/penyelesaian-75-unit-rumah-di-desa-rampa-kotabaru-ketua-dprd-akan-masukkan-di-anggaran-perubahan?page=all>
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/41519-realisisasi-dak-fisik-kalsel-baru-6-persen/12>

Catatan:

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.¹ Tujuan adanya Dana Alokasi Khusus adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.²

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.³ DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.⁴ Daerah Tertentu merupakan daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.⁵

Penentuan Daerah Tertentu menentukan besaran alokasi DAK harus memenuhi:⁶

a. Kriteria umum

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

b. Kriteria khusus

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus;
- 2) Karakteristik daerah.

Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

c. Kriteria teknis

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 1 ayat (24)

² Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

³ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 50 ayat (1) dan (2)

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 51 ayat (1)

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 51 ayat (2)

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 54 ayat (2)

Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait dan disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Penghitungan alokasi DAK dilakukan oleh Menteri Keuangan, setelah menerima usulan kegiatan dari Menteri Teknis. Penghitungan alokasi DAK melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:⁷

- a Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;
- b Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD dan tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.⁸ Menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.⁹

1. DAK Fisik

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara/Lembaga menyusun rancangan kriteria penilaian awal usulan DAK Fisik. Rancangan kriteria penilaian awal usulan DAK Fisik dibahas dan disepakati bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.¹⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing melakukan penilaian awal atas usulan DAK Fisik berdasarkan kriteria penilaian awal atas usulan DAK Fisik yang telah disepakati.¹¹ Penilaian awal atas usulan DAK Fisik, mempertimbangkan¹² :

- a target keluaran dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang per tahun secara nasional sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah;
- b target keluaran dari lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang dalam jangka menengah secara nasional sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. pagu anggaran per jenis/bidang/subbidang DAK Fisik

Berdasarkan hasil penilaian awal atas usulan DAK Fisik, Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Pemerintah Daerah melakukan pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi atas usulan DAK Fisik. Sinkronisasi dan harmonisasi bertujuan untuk membahas:¹³

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (1)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 60 ayat (1) dan (3)

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 61 ayat (1)

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 17 ayat (1) dan (2)

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 17 ayat (3)

¹² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 17 ayat (4)

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 18 ayat (1) dan (2)

- a. kesesuaian antara hasil penilaian awal usulan DAK Fisik dengan kebutuhan dan prioritas daerah;
- b. keselarasan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik, APBD dan/atau sumber pendanaan lainnya dalam satu daerah;
- c. pemenuhan kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. keselarasan kegiatan DAK Fisik suatu daerah dalam satu wilayah provinsi dengan mempertimbangkan rekomendasi gubernur.

Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan yang didanai dari DAK Fisik dengan mengacu pada:¹⁴

- a. dokumen usulan DAK Fisik;
- b. hasil penilaian usulan DAK Fisik;
- c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik; dan
- d. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Usulan rencana kegiatan paling sedikit memuat:¹⁵

- a. rincian dan lokasi kegiatan;
- b. target keluaran;
- c. rincian pendanaan kegiatan;
- d. metode pelaksanaan kegiatan; dan
- e. kegiatan penunjang.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik. Kegiatan penunjang meliputi:¹⁶

- a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
- b. biaya tender;
- c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
- d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- e. penyelenggaraan rapat koordinasi;
- f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota; dan/atau
- h. kegiatan lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai petunjuk teknis DAK Fisik.

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 26 ayat (1)

¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 26 ayat (2)

¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 28 ayat (1) dan (2)

Penyaluran DAK Fisik dilakukan per jenis, dengan ketentuan:¹⁷

- a. per bidang untuk bidang DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang; atau
- b. per subbidang untuk bidang DAK Fisik yang memiliki subbidang.

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dilakukan secara:¹⁸

- a. bertahap;

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
dokumen tahap I berupa:
 - a) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang tahun anggaran sebelumnya;
 - c) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya.
 - d) rencana kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga dan tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi; dan
 - e) daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang;
- 2) tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober berdasarkan nilai kontrak yang terdapat dalam daftar kontrak kegiatan, dengan ketentuan:
 - a) nilai kontrak lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi disalurkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari nilai kontrak dimaksud;
 - b) nilai kontrak lebih besar dari 25% (dua puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi disalurkan sebesar selisih nilai kontrak dimaksud dengan penyaluran tahap I; dan
 - c) nilai kontrak sampai dengan 25% (dua puluh persen) pagu alokasi tidak disalurkan.

Dokumen tahap II berupa:

- a) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang sampai dengan tahap I; dan
- b) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang;

¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 33 ayat (1)

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1)

- 3) tahap III dilakukan untuk nilai kontrak dalam daftar kontrak kegiatan yang nilainya lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi, paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.

Dokumen tahap III berupa:

- a) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran kegiatan DAK Fisik per Jenis per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - b) laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian keluaran 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang; dan
 - c) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang.
- b. sekaligus; atau
- Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara sekaligus dilakukan dalam hal¹⁹:
- 1). pagu alokasi DAK Fisik per jenis per bidang sebesar sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
 - 2). seluruh kegiatan pada bidang/ subbidang DAK Fisik tidak dapat dibayarkan secara bertahap sesuai rekomendasi dari Kementerian Negara/Lembaga yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- c. campuran.

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara campuran dilakukan dalam hal pada bidang/subbidang DAK Fisik terdapat sebagian kegiatan DAK Fisik yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap.²⁰

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara campuran dilakukan dengan ketentuan:²¹

- 1) kegiatan DAK Fisik yang dibayarkan secara bertahap, disalurkan secara bertahap; dan
- 2) kegiatan DAK Fisik dibayarkan secara sekaligus, disalurkan sebesar nilai kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima barang dan/atau pekerjaan untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang diterima Kepala KPPN.

2. Penghentian penyaluran DAK Fisik

¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 36 ayat (1)

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 39 ayat (1)

²¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 40 ayat (1)

Penghentian penyaluran DAK Fisik dilakukan dalam hal²²:

- a. Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara bertahap dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran;
- b. Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran;
- c. menteri/pimpinan lembaga mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan/atau
- d. Kepala Daerah mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan disertai surat persetujuan dari menteri/pimpinan lembaga.

Permintaan penghentian penyaluran DAK Fisik, dapat dilakukan untuk seluruh atau sebagian pagu DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang setelah dilakukan pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Negara/Lembaga.²³

3. Penggunaan Sisa DAK Fisik

Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan/atau sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya pada bidang/ subbidang yang keluaran yang kegiatannya sudah tercapai, sisa DAK dan/atau sisa DAK Fisik tersebut dapat digunakan dengan ketentuan:²⁴

- a. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.

Keluaran kegiatan yang sudah tercapai ditunjukkan dengan telah direalisasikannya seluruh keluaran kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak.²⁵ Kepala Daerah menyampaikan laporan penggunaan sisa DAK dan/ atau DAK Fisik kepada Kepala KPPN sesuai dengan wilayah kerjanya setelah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran.²⁶

Dalam hal terdapat sisa DAK sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan/atau sisa DAK Fisik tahun-tahun anggaran sebelumnya pada bidang/subbidang yang keluaran kegiatannya belum

²² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 41 ayat (1)

²³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 41 ayat (2)

²⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 43 ayat (1)

²⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 43 ayat (3)

²⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 43 ayat (4)

tercapai, sisa DAK dan/atau sisa DAK Fisik tersebut dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan:²⁷

- a. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian keluaran (*output*) dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat keluaran kegiatannya belum tercapai; atau
- b. untuk sisa DAK sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan/atau DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan Daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.

²⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 43 ayat (2)